

TUGAS ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
“MASALAH PUBLIK”



DISUSUN OLEH
KELOMPOK II

Fetri Sya Agata	1916041057 (Reg A)
Ratna Atika S.	1916041051 (Reg A)
M. Alif Listiansyah	1916041053 (Reg A)
Sabila Zakiyah	1916041061 (Reg A)
Olivia Putri Taryssa	1946041008 (Nreg)
Rakha Aulia Senjaya	1946041017 (Nreg)

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021

A. PENGERTIAN MASALAH PUBLIK

Masalah merupakan suatu hal yang seharusnya sedang terjadi tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Masalah diartikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang akan menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan sebagian orang yang menginginkan perbaikan (Wirnano 2007). Sedangkan publik merupakan suatu hal yang menyangkut orang banyak atau berhubuga dengan masyarakat.

Masalah sendiri dibagi menjadi dua yaitu masalah publik dan masalah privat. masalah privat yang artinya masalah yang dapat diselesaikan oleh diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain sedangkan masalah publik akan terjadi apabila masalah privat sudah dirasakan atau melibatkan kepada sekelompok masyarakat dan hanya dapat diatasi oleh pemerintah. Masalah publik juga dapat diartikan masalah yang memiliki dampak yang cukup luas dan melibatkan konsekuensi bagi masyarakat atau kelompok yang tidak terlibat secara langsung.

B. PROSES MENGIDENTIFIKASI MASALAH

Menemukan masalah merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penelitian. Dalam proses penyelidikan dan pemecahan masalah, sangat penting untuk menemukan dan mengidentifikasi masalah yang benar. Menentukan masalah ini pada dasarnya adalah langkah selanjutnya setelah peneliti memilih fenomena yang akan diteliti. Langkah ini penting untuk menentukan apa yang sebenarnya perlu dipelajari secara lebih mendalam.

Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan banyak cara. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian kepustakaan, perbandingan dengan kondisi ideal, pengujian, atau pengamatan langsung. Karena memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan apa yang akan diselidiki dalam penyidikan, umumnya ditentukan pada awal penyidikan. Identifikasi masalah yang salah dapat mengurangi efektivitas penyelidikan, bahkan jika itu tidak relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Peneliti sering mengidentifikasi masalah dengan menjelaskan masalah apa yang ada dalam fenomena tersebut. Masalah-masalah ini akan diukur di masa depan sesuai dengan prosedur penelitian yang ada dan dihubungkan dengan teori.

Dalam mengidentifikasi masalah penelitian terlebih dahulu di lalui dengan proses berfikir dan menemukan masalah penelitian dan mencoba menemukan gagasan pokok dalam menemukan masalah tersebut. Dalam proses pengidentifikasian tersebut akan di lalui beberapa proses yaitu di antaranya :

- a. Mengurai pertanyaan tentang tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengurai informasi dan gambaran pasti terkait suatu masalah. Dengan mengurai suatu masalah maka akan mendapatkan jawaban sementara terkait dengan masalah dan akan memenuhi kebutuhan informasi dan dapat membuka wawasan peneliti terkait dengan masalah yang hendak dipecahkan.
- b. Mencari sumber masalah. Setelah merenungkan apa saja permasalahan yang perlu diidentifikasi, kemudian peneliti harus mencari sumber masalah yang akan di jadikan bahan penelitian tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencari akar permasalahan dan di gunakan untuk menjabarkan darimana saja sumber masalah tersebut. Hal ini juga dapat di jadikan acuan oleh peneliti dikarenakan setiap masalah belum tentu berasal dari akarnya. Bisa jadi, masalah tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor pendukung yang menyebabkan masalah tersebut.
- c. Menciptakan kalimat isu. Setelah masalah dan akar permasalahan dapat di temukan, peneliti harus menciptakan kalimat isu. Kalimat isu harus di buat dengan kalimat yang dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca dan harus di lakukan dengan teknik yang mendalam dan dengan riset beserta analisis yang berdasarkan dengan fakta yang ada dan telah di temukan di lapangan.

Dalam mengidentifikasi masalah, peneliti harus melewati ketiga proses tersebut untuk dapat mengidentifikasikan suatu masalah dalam sebuah penelitian. Proses tersebut harus di lalui dengan analisis yang jelas, spesifik, dan objektif.

C.CIRI-CIRI MASALAH PUBLIK

Suatu masalah akan menjadi masalah publik apabila terlibat banyak orang didalamnya dan apabila terdapat dampak akibat yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung. (Anggara, 2014) Dan juga suatu masalah akan menjadi masalah publik apabila ada orang atau sekelompok orang yang menggiring masalah tersebut ke arah tindakan pada mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. (Handoyo, 2012)

Ciri-ciri masalah publik menurut William N. Dunn Dalam Analisis kebijakan publik (Meutia, 2017), diantaranya:

1. Interdependence/saling kebergantungan, yaitu masalah-masalah publik di banyak bidang saling terkait dan berhubungan satu sama lain seperti kumpulan tali yang terkumpul, kusut dan rumit.
2. Subjektivitas, yaitu masalah yang terjadi dari hasil pemikiran sengaja pada lingkungan tertentu, masalah tersebut adalah cabang dari situasi masalah yang dibuat oleh analisis. Sehingga suatu fenomena bisa dijadikan masalah.
Subjektivitas membuat permasalahan-permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dievaluasi secara selektif, dan jelaskan. (Anggara, 2014)
3. Artificiality/sifat buatan, yaitu masalah muncul dikarenakan manusia membuat penilaian tentang keinginannya untuk menciptakan perubahan pada situasi. Dalam hal ini masalah muncul dikarenakan adanya penelitian oleh manusia dengan pandangan subjektifnya.
Sifat buatan membuat masalah yang dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial. (Anggara, 2014)
4. Dinamika masalah kebijakan. Solusi untuk memecahkan masalah bisa berubah-ubah sesuai pandangan manusia terhadap masalah tersebut, dikarenakan tiap kondisi dan situasi mempunyai solusi yang berbeda jika mempunyai masalah yang sama.

William N. Dunn mengemukakan dengan adanya kondisi ketergantungan, subjektivitas, artificiality, dan kedinamisan masalah bisa menjadikan kita untuk berhati-hati pada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dan tidak terduga pada suatu kebijakan dibuat atas dasar solusi yang salah.

D.KATEGORI-KATEGORI MASALAH PUBLIK

Kategori masalah publik (Anggara, 2014) yaitu:

1. Masalah publik diklasifikasikan menjadi masalah prosedural dan substantif.
Masalah prosedural yaitu masalah yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah dalam organisasi dan bagaimana pemerintahan melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan masalah substantif adalah akibat nyata dari dampak kegiatan manusia, contohnya seperti masalah lingkungan yang tercemar dan sebagainya.
2. Masalah publik diklasifikasikan dari asal-usul masalah tersebut yaitu terdapat masalah luar negeri dan masalah dalam negeri.

Masalah luar negeri merupakan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar negara, contohnya seperti adanya perjanjian perekonomian, nuklir, dan lain sebagainya. Sedangkan masalah dalam negeri adalah masalah yang terjadi di dalam negeri, contohnya seperti masalah kesejahteraan, masalah kemiskinan, pendidikan, pelayanan publik, kriminalitas, dan lain sebagainya.

3. Masalah publik diklasifikasikan berdasarkan pada jumlah orang yang terpengaruh serta kaitannya antara satu dengan yang lain. Yaitu masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif.

Masalah distributif adalah masalah yang meliputi sejumlah kecil masyarakat yang dapat ditanggulangi dan di selesaikan satu persatu, contohnya yaitu adanya pengendalian reboisasi hutan, pengendalian lingkungan tanpa sampah, dan lain sebagainya. Masalah regulasi adalah masalah yang mendorong munculnya tuntutan-tuntutan masyarakat untuk membatasi tindakan pihak lain yang dirasa kurang tepat. Sedangkan Masalah redistributif adalah masalah yang mengacu pada perubahan sumber-sumber antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan itu menjadi permasalahan ketika terdapat hal-hal yang tidak diterima oleh masyarakat seperti ketidakadilan dan lain sebagainya.

E. METODE PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan bagian dari tahap-tahap penelitian yang kedudukannya penting dan tidak boleh terlewat saat melakukan penelitian. Dalam suatu kegiatan penelitian, apabila perumusan masalah tidak dilakukan maka kegiatan penelitian itu akan menjadi sia-sia dan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Perumusan masalah juga dikenal dengan sebutan *research questions* atau *research problem*, yang diartikan sebagai perumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam hal sebagai fenomena mandiri, maupun dalam hal fenomena yang terkait satu sama lain antar suatu fenomena, baik dalam hal penyebab maupun akibat. Dalam kegiatan perumusan masalah ini ada beberapa metode yang perlu dipahami, ada 5 metode yang harus dilakukan saat sebelum menentukan hasil rumusan masalah, yaitu:

- Analisis batas, digunakan dalam mengestimasi batas ruang lingkup masalah yang akan dirumuskan, terdapat tiga langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis batas dan memudahkan analisis kebijakan memformulasikan masalah yaitu: a) Pencarian sampel secara bola salju (*Saturation sampling*) : mengetahui pihak yang pro dan kontra serta pengaruhnya. b) Pencarian representasi : memberikan makna pada tiap kejadian.

c)keunggulan metode ini yaitu dapat mengetahui karakter, keefektifan biaya, koordinasi, dan ketepatan dalam batasan masalah.

- Analisis klasifikasi, metode ini memperjelas konsep yang digunakan dalam mendefinisikan dan mengkategorikan kondisi permasalahan, berdasarkan: a) Pembagian logis yaitu pemilihan suatu kelas dan membaginya ke dalam komponen bagian. b) Klasifikasi sosial yaitu mengkombinasikan situasi, obyek, maupun orang-orang ke dalam kelompok atau kelas yang lebih besar.
- Analisis hirarki, metode ini mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin dari situasi masalah: sebab yang masuk akal (possible causes), sebab yang masuk akal (plausible causes), dan sebab yang dapat ditindaklanjuti (actionable causes).
- Brainstroming, metode ini menggunakan curah pendapat dari orang-orang yang mengetahui masalah dan tempat yang diteliti. Dari metode ini dapat dihasilkan ide-ide, strategi yang dapat membantu mengidentifikasi kondisi permasalahan.
- Analisis persepektif ganda, yaitu metode dengan memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai masalah-masalah dan peluang pemecahannya menggunakan cara yang sistematis, ada 3 pandangan dalam metode ini: a) Persepektif teknis, yang berorientasi pada tujuan dan peningkatan kinerja b) Persepektif organisasional, berorientasi pada proses c) persepektif personal, berorientasi pada individu.

F. TIPOLOGI MASALAH PUBLIK

Elemen	Struktur Masalah		
	Terstruktur Baik	Agak Terstruktur	Tidak Terstruktur
Pembuat Kebijakan	Satu atau beberapa	Satu atau beberapa	Banyak
Alternatif	Terbatas	Terbatas	Tak Terbatas
Kegunaan (nilai)	Konsensus	Konsensus	Konflik
Probabilitas	Dapat dihitung	Sulit dihitung	Sangat sulit dihitung
Contoh	Penghentian PNS	Pembebasan tanah	Kemiskinan Kriminalitas

G. KARAKTERISTIK MASALAH PUBLIK

Adapun beberapa karakteristik yang dimiliki masalah publik adalah sebagai berikut

- Saling ketergantungan (interdependensi)
- Subyektivitas hasil analisis dalam konteks lingkungan tertentu
- Sifat buatan (artificiality) suatu situasi dianggap masalah karena ada keinginan untuk mengubah situasi tersebut.
- Dinamika masalah kebijakan masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau konteks lingkungannya berbeda.

H. TIPE - TIPE MASALAH PUBLIK

a) Charles O. Jones

Menurut Charles O Jones, ada dua tipe masalah publik:

- masalah-masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok yang bertujuan untuk melakukan tindakan.
- 2. Masalah-masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual, tetapi kurang terorganisir dan kurang mendapat dukungan.

b). William Dunn

elemen	Struktur masalah		
	Terstruktur dengan baik	Agak terstruktur	Tidak terstruktur
Pembuat kebijakan	Satu atau beberapa	Satu atau beberapa	banyak
alternatif	terbatas	terbatas	Tidak terbatas
Kegunaan (nilai)	konsensus	konsensus	konflik
	Dapat dihitung	Sulit dihitung	Sangat sulit dihitung

CONTOH KASUS

Kewargaan dan Kolaborasi Pemecahan Masalah Publik: Studi Isu Sampah Di Kota Kupang

Seiring dengan perkembangan penduduk aktivitas sosial dan ekonomi, maka sampah menjadi dampak ikutan yang telah berubah menjadi persoalan publik serius di banyak negara termasuk Indonesia. Sampah juga menjadi persoalan publik yang penting terkait dengan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menjadi media berkembang biaknya bermacam vector penularan penyakit. Dengan pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa permasalahan sampah bukanlah suatu hal yang mudah untuk ditangani. Masalah terkait sampah sudah menjadi masalah publik serius dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Namun pada kenyataannya tidak ada tindakan serius untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal seperti ini pun terjadi pada pemerintahan Kota Kupang. Pada tahun 2019 pemerintah dan publik Kota Kupang dihebohkan dengan keluarnya hasil penilaian tingkat kebersihan kota-kota di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang menempatkan Kota Kupang sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia. Bersamaan dengan itu bahkan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat pada suatu kesempatan juga memberikan penilaian bahwa Kota Kupang adalah kota terjorok di NTT . Sejak itu, sampah mulai menjadi isu publik dan pemerintah baik di Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi NTT.

Menyikapi permasalahan sampah yang kian membesar. Pemerintah Kota Kupang telah memiliki kerangka regulasi untuk menangani sampah di kota ini yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Perda ini diatur sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran yakni Bab XV dengan ketentuan pidana yang termuat pada pasal 24 ayat 1 dimana setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000. Namun perda ini dirasa belum mampu memberikan dampak kepada setiap masyarakat nya, maka dari itu sampah semakin hari semakin bertambah.

Selain itu, respon kebijakan terhadap permasalahan sampah cenderung reaktif dan tidak komprehensif (parsial). Pasca penetapan Kota Kupang sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia, Walikota Kupang, Jefri Riwo Kore meresponnya akan menyelesaikan permasalahan sampah satu bulan. Namun pilihan strateginya cenderung sangat teknis yaitu dengan

mengerahkan seluruh ASN untuk membersihkan sampah yang ada. Kebijakan parsial lainnya yang nampak adalah kebijakan Walikota yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menyediakan tong sampah di setiap halaman tempat usaha mereka. Kebijakan ini nampak tidak efektif karena sifatnya yang cenderung menjadi himbauan dan pada batas tertentu tidak tersosialisasi secara baik kepada para pengusaha yang ada di Kota Kupang.

Untuk itu pemerintah setempat harus melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah kebijakan yang diberlakukan diterapkan dengan baik atau tidak. Selain itu dengan adanya evaluasi maka pemerintah setempat juga bisa melihat dibagian mana saja permasalahan yang ada cenderung tidak berkurang atau malah melonjak. Hal ini didasari karena kebijakan - kebijakan tersebut tidak serta merta akan langsung memberikan efek atau dampak yang baik ketika diterapkan. Harus ada pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk melengkapi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ja'far dkk.(2021). *PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN*. Ad-Man-Pend, 4(1), Hal 26
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*.
- Bergan, J. R. (1995). Evolution of a problem-solving model of consultation.*Journal of Educational and Psychological Consultation*, 6, 111-123.
- Christ, T.J., & Arañas, Y.A. (2014). *Best practices in problem analysis*. In A. Thomas & J. Grimes (Eds.), *Best Practices in School Psychology VI*. Bethesda, MD: National Association of School Psychologists.
- Dewi, R. (2017). Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik. Publikauma: *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 5(1), 6-12.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Meutia, Fitri Intan. (2013). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandar Lampung : AURA (CV. Anugerah Utama Raharja).
- P. Scaryani, Laurensius., dan Tomono, M. Lenny. (2020). Kewarganegaraan dan Kolaborasi Pemecahan Masalah Publik : Studi Isu Sampah di Kota Kupang. *Timonese Journal of Public Health*, 2 (1).
- Ritonga, Rahmansyah. (2010). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Hal 2-3.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).